

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan besar yang masih harus ditangani oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi penting karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan pada dasarnya merujuk pada keadaan kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dirasakan seseorang, baik karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup atau karena negara atau daerah tidak mampu memberi perlindungan sosial kepada penduduknya (Suharto, 2009). Kemiskinan menurut Kuncoro (1997), merupakan kondisi tidak mampu terpenuhinya standar hidup minimum. Sedangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar minimum untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan akan makanan ataupun non-makanan.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang bersifat multidimensional dan kompleks yang mencakup berbagai dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, dimensi ruang dan waktu. Oleh sebab itu, menurut M. Nasir, dkk (2008) usaha dalam pengentasannya harus dilakukan secara komprehensif, yang memuat berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilakukan secara terpadu. Hal ini terutama dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dan ditambah dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Pemerintah tentu sudah mengupayakan berbagai hal untuk mengurangi kemiskinan ini, karena jika dibiarkan permasalahan ini akan menjadi racun bagi negara itu sendiri karena berhadapan dengan kesejahteraan rakyat dan menghambat proses pembangunan.

Adanya kemiskinan ini dapat menjadi pangkal dari berbagai masalah selanjutnya. Kemiskinan menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh masyarakat. Kemiskinan mengakibatkan banyak anak-anak tidak dapat memperoleh pendidikan berkualitas serta tidak dapat mengenyam pendidikan ke tingkat lebih tinggi, membuat masyarakat sulit untuk membiayai layanan kesehatan, masyarakat tidak mampu menabung apalagi berinvestasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, keluarga kurang mendapat jaminan sosial dan perlindungan, dan juga meningkatkan angka kriminalitas.

Begitu banyak permasalahan yang dapat timbul jika angka kemiskinan di suatu negara masih tinggi. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan oleh pemerintah harus punya visi yang sejalan dengan arah tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Kegiatan-kegiatan pembangunan hendaknya juga difokuskan untuk pembangunan daerah, terkhusus bagi daerah terbelakang sehingga terciptanya pemerataan. Pembangunan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan berlangsung terus menerus sehingga hasilnya semakin mendekati tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, turunnya kemiskinannya termasuk jadi indikator penting dari pembangunan nasional. Namun hal tersebut masih menjadi persoalan yang sukar ditempuh dan masih menjadi pekerjaan rumah oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Mengenai kondisi kemiskinan untuk wilayah Sumatera, terdapat beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, tiga provinsi di Sumatera dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 yaitu provinsi Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Berikut besaran tingkat kemiskinannya yaitu Provinsi Aceh sebesar 15,32%, Provinsi

Bengkulu sebesar 15,23%, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,71%. Angka ini melebihi tingkat kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,41%. Selain itu dari segi nasional, pada tahun 2019 tersebut Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi ketujuh di Indonesia. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.

Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir (2002), sebuah negara dapat disebut miskin yaitu terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan perkapitanya, tingginya laju pertumbuhan penduduk (lebih dari 2 persen per tahun), banyak tenaga kerjanya bermatapencaharian pada sektor pertanian, dan juga terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Jika dilihat dari pendapatan perkapitanya, berdasarkan pada data BPS tahun 2019 Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan penerimaan PDRB perkapita terendah di Sumatera yaitu sebesar Rp23.276,15. Dan juga pada tahun 2019 tersebut pendapatan Provinsi Bengkulu paling banyak didapat dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 28,17% dari total PDRB.

Berdasarkan data dari BPS, selama periode tahun 2015-2019 tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu sudah mengalami tren yang menurun. Tingkat kemiskinan ini pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,88%, tahun 2016 turun menjadi 17,31%, kemudian tahun 2017 sebesar 16,45%, tahun 2018 turun menjadi 15,43%, dan pada tahun 2019 sudah menjadi 15,23%. Walaupun tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu telah menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tingkat kemiskinannya masih tinggi.

Program pengurangan kemiskinan dan ketertinggalan telah menjadi prioritas utama pemerintah Bengkulu selama beberapa tahun terakhir. Melihat kepada visi Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2015-2021 “Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi” telah menunjukkan target pemerintahnya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan ini. Sudah banyak program yang dibuat pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, namun kemiskinan masih jadi persoalan serius di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu dewan riset daerah untuk mendalami permasalahan ini dan melihat apa saja penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Hasil kajian ini yang nantinya menjadi program kebijakan bagi gubernur untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam Kuncoro (2006) mengatakan bahwa penyebab kemiskinan akan berakhir pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of proverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, rendahnya pendidikan, ketidaksempurnaan pasar, dan juga kekurangan modal membuat produktivitas masyarakat rendah dan tidak mampu bersaing. Rendahnya produktivitas masyarakat membuat pendapatan yang mampu didapat juga rendah, ini membuat kemampuan menabung dan investasi seseorang semakin rendah bahkan tidak mampu sama sekali. Kecilnya tabungan dan investasi ini membuat seseorang tidak mampu untuk mendapatkan hidup layak dan akan berujung pada keterbelakang. Apabila hal ini terus dibiarkan maka siklus ini akan terus berputar sehingga harus dilakukan pemutusan rantai kemiskinan ini dengan berbagai cara.

Pembentukan modal menjadi salah satu kunci untuk dapat keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Besarnya pembentukan modal juga dapat dipengaruhi

dari jumlah tabungan dan investasi yang dilakukan. Untuk menanamkan modal juga harus memperhatikan kondisi perekonomian negara tersebut, apakah menguntungkan atau tidak untuk menanamkan modal. Kinerja perekonomian salah satunya dapat tergambar dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keadaan pertumbuhan ekonomi ini dapat menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal atau tidak, sehingga modal yang ada dapat digunakan untuk mendanai pembangunan.

Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai adalah salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro, karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor suatu negara dapat meningkatkan pembangunan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Antara pertumbuhan dan kemiskinan menurut Kuznet (dalam Tulus Tambunan, 2001) memiliki hubungan yang kuat, karena pada tahapan awal proses pembangunan cenderung meningkatkan kemiskinan dan ketika mendekati tahap akhir kemiskinan perlahan mulai menurun. Ebuloluwa dan Yusuf (2018) melakukan penelitian di Nigeria dengan mengeksplorasi pengaruh pertumbuhan ekonomi pada pengurangan kemiskinan secara empiris. Hasilnya menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi menjadi alat vital untuk pengentasan kemiskinan di Nigeria dengan hubungan yang negatif.

Pendidikan diduga juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Elfindri, dkk (2019) menyatakan pendidikan menjadi sangat mendasar karena dapat menentukan bagaimana masa depan kualitas SDM, tenaga kerja, serta dapat memberikan kontribusi bagi nilai tambah barang dan jasa. Sehingga menurut Simmons (dalam Todaro dan Smith, 2006) pendidikan menjadi cara yang dapat menyelamatkan diri dari kemiskinan. Penelitian oleh Hong dan Pandey (2007)

menyatakan bahwa penduduk yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang berkemungkinan lebih kecil dapat terjebak pada kemiskinan. Ini berarti dengan adanya pendidikan terutama dengan tingkat yang lebih tinggi dapat membuat seseorang mendapatkan pendapatan lebih baik.

Thapa (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan menjadi langkah pertama dalam proses pembangunan dan memberikan perbaikan bagi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Pendidikan membuat masyarakat lebih produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta penghasilan yang diterimanya. Thapa juga menyatakan jika terdapat hubungan negatif antara angka melek huruf (pendidikan) di Nepal dengan pendapatan rumah tangga (kemiskinan). Terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur tingkat pendidikan pada suatu daerah, salah satu indikator tersebut yaitu Angka Melek Huruf (AMH), yaitu indikator untuk mengetahui seberapa proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis serta melihat seberapa jauh penduduk terbuka terhadap pengetahuan.

Selain pertumbuhan ekonomi dan pendidikan, banyaknya pengangguran juga diduga berpengaruh terhadap kemiskinan. Menurut Arsyad (1997) mengatakan terdapat hubungan yang sangat erat antara tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan. Sukirno (2004) menyatakan adanya pengangguran dapat membuat berkurangnya pendapatan yang dapat dihasilkan masyarakat. Berkurangnya pendapatan ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, sehingga dapat membuat mereka semakin mudah terjatuh dalam masalah kemiskinan karena tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi ukuran yang dapat melihat kondisi

pengangguran suatu daerah. TPT yaitu persentase jumlah pengangguran di suatu daerah terhadap jumlah angkatan kerjanya. Tingginya angka TPT dapat menggambarkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang belum terpakai pada pasar tenaga kerja serta melihat bagaimana progres program ketenagakerjaan pemerintah.

Lundahl (2005) menyatakan tingginya laju pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja, sehingga lapangan pekerjaan juga perlu ditambah. Jika tidak, hal ini dapat membuat kemiskinan semakin meningkat dalam jangka panjang. Menurut penelitian oleh Okorie dan Anowor (2017) yang melakukan penelitian terhadap kemiskinan di Nigeria mendapatkan hasil bahwa pengangguran menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Nigeria dan antara pengangguran dan kemiskinannya memiliki hubungan yang positif, dimana saat pengangguran meningkat dapat meningkatkan angka kemiskinannya.

Dari latar belakang dan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa selama periode lima tahun terakhir, kemiskinan Provinsi Bengkulu sudah menunjukkan penurunan. Walau demikian, Bengkulu masih jadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Sumatera. Terdapat beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran yang diduga memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu sehingga penulis ingin menganalisa seberapa jauh pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Penulis meneliti permasalahan ini menjadi penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang masih belum terselesaikan hampir di tiap negara. Banyak akibat yang dapat ditimbulkan dari tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan kerap menyebabkan ketimpangan sosial di dalam masyarakat sehingga dapat menghambat proses pembangunan. Bengkulu menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi diantara provinsi-provinsi di Sumatera. Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu sudah cenderung menurun namun angkanya sendiri masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran diduga memiliki hubungan yang dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk membahas masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu serta mengetahui faktor mana yang dapat mempengaruhinya. Faktor yang berpengaruh ini nantinya dapat lebih dipacu dan dioptimalkan untuk menangani masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Dari uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan-permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimanakah pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disajikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapat yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan informasi serta referensi untuk membuat dan mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
2. Bagi penulis, adanya penelitian ini menjadi pengalaman serta dapat mengembangkan pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.